

Melampaui Batas Waktu: Warisan Kepemimpinan B.J. Habibie untuk Bangsa



**Irene Tiara Krista
Benedicta Karen Jasmine Widayat
Trivena Calista Prameswari**

*Mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi
Universitas Tarakanita*

Takdir di Tengah Badai Reformasi

Ketika berbicara mengenai kontribusi untuk bangsa, pikiran kita sering kali terjebak pada hal-hal yang sifatnya seremonial dan kaku. Selama puluhan tahun, kontribusi terhadap negara cenderung diukur hanya dari aspek formalitas, seperti kedisiplinan birokrasi atau pengabdian militer. Padahal, sejarah modern Indonesia membuktikan bahwa sumbangsih terbesar justru kerap lahir dari keputusan berani di tengah situasi darurat nasional. Realitas krusial inilah yang terekam abadi pada masa transisi Orde Baru menuju Era Reformasi di bawah kepemimpinan Bacharuddin Jusuf (B.J.) Habibie. Beliau merupakan presiden ketiga Republik Indonesia, seorang pria asal Parepare, Sulawesi Selatan, yang pada usia 18 tahun merantau ke Jerman untuk mendalami teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang. Setelah bertahun-tahun mengabdikan sebagai ilmuwan kelas dunia di luar negeri dan pulang ke tanah air sebagai Menteri Riset dan Teknologi (Ristek), garis takdir politik membawa Habibie dilantik menjadi Wakil Presiden RI ketujuh mendampingi Soeharto.

Namun, jabatan tersebut justru menempatkan Habibie tepat di pusaran badai sejarah yang paling menentukan bagi keberlangsungan negeri ini. Memasuki awal tahun 1998, stabilitas Orde Baru yang telah berjalan selama tiga dekade runtuh akibat hantaman Krisis Moneter (Krismon) yang melanda sejak 1997. Nilai tukar rupiah amblas, inflasi membubung tinggi, sektor perbankan lumpuh, dan harga kebutuhan pokok melonjak hingga mencekik perekonomian rakyat. Seiring dengan keterpurukan tersebut, rakyat Indonesia mulai menyuarakan ketidakpuasan secara masif terhadap jalannya pemerintahan. Krisis ekonomi ini dengan cepat berubah menjadi krisis kepercayaan publik secara massal.

Gelombang demonstrasi besar-besaran yang dimotori oleh mahasiswa akhirnya mengepung ibu kota untuk menuntut reformasi total. Puncaknya, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto resmi menyatakan pengunduran dirinya dari tampuk kekuasaan. Momen inilah yang menandai pergantian kepemimpinan nasional secara dramatis, di mana B.J. Habibie langsung dilantik menjadi presiden baru di tengah kondisi negara yang sedang membara dan berada di ambang perpecahan.



Illustrated by AI

Meskipun berbagai kebijakan ekonomi B.J. Habibie berhasil memperbaiki kondisi nasional secara bertahap, tantangan yang dihadapinya tidak berhenti pada upaya pemulihan ekonomi semata. Sebagai presiden transisi di tengah era Reformasi, Habibie juga dihadapkan pada tuntutan masyarakat akan perubahan sistem politik yang lebih terbuka, transparan, dan demokratis. Salah satu langkah penting yang diambilnya adalah membuka ruang kebebasan pers sebagai bagian dari upaya membangun kembali kehidupan demokrasi di Indonesia. Demokrasi tidak hanya diukur dari penyelenggaraan pemilihan umum, tetapi juga dari seberapa bebas masyarakat memperoleh informasi dan menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Namun, selama lebih dari tiga dekade pemerintahan Orde Baru, kebebasan pers berada di bawah kontrol negara melalui berbagai regulasi, seperti Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), praktik sensor, dan pembredelan media yang dianggap mengkritik pemerintah. Akibatnya, fungsi pers sebagai penyampai informasi dan pengawas kekuasaan tidak dapat berjalan secara optimal.

Menyadari kondisi tersebut, Habibie kemudian menghapus SIUPP serta mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Keputusan tersebut menjadi fondasi lahirnya kebebasan pers yang hingga kini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menyampaikan kritik secara terbuka.

Inilah salah satu kontribusi nyata Habibie yang masih dirasakan lebih dari dua dekade kemudian. Kebijakan tersebut menjadi salah satu warisan penting yang menunjukkan bahwa kepemimpinan Habibie yang singkat mampu memberikan dampak jangka panjang bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Meski kebebasan pers saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti disinformasi, kepentingan politik dalam media, dan kekerasan terhadap jurnalis, fondasi yang dibangun pada masa pemerintahannya tetap menjadi pijakan bagi kehidupan pers yang lebih independen. Namun, reformasi di bidang pers hanyalah salah satu dari berbagai keputusan besar yang diambil Habibie. Di tengah upaya membangun demokrasi, ia juga harus menghadapi persoalan politik yang tidak kalah kompleks, termasuk penyelesaian isu Timor Timur yang menjadi salah satu kebijakan paling berani sekaligus paling kontroversial selama masa kepemimpinannya.

Di tengah upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, Habibie juga harus menghadapi persoalan Timor Timur yang selama bertahun-tahun menjadi perhatian, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Persoalan ini bermula ketika Timor Timur ditetapkan sebagai provinsi ke-27 Indonesia pada tahun 1976. Namun, tidak semua masyarakat Timor Timur menerima keputusan tersebut. Sebagian masyarakat tetap menginginkan kemerdekaan dan berharap dapat menentukan sendiri masa depan wilayahnya. Perbedaan pandangan tersebut memicu konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun dan mengundang perhatian serta tekanan dari berbagai negara maupun komunitas internasional. Akibatnya, konflik di Timor Timur menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintah Indonesia pada masa Reformasi.

Menghadapi situasi tersebut, Habibie mengambil langkah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat Timor Timur untuk menentukan masa depan wilayahnya melalui referendum pada 30 Agustus 1999. Keputusan ini menjadi salah satu kebijakan paling berani sekaligus paling kontroversial selama masa kepemimpinannya. Terlepas dari berbagai pandangan yang berkembang, langkah tersebut menunjukkan keberanian Habibie dalam mengambil keputusan sulit untuk mencari penyelesaian atas konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun melalui mekanisme yang lebih demokratis.

Krisis Moneter dan Kondisi Indonesia Menjelang Reformasi

Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia mengalami salah satu krisis ekonomi terbesar dalam sejarah yang dikenal sebagai krisis moneter. Krisis ini merupakan bagian dari Krisis Finansial Asia yang diawali dengan melemahnya nilai tukar baht Thailand terhadap dolar Amerika Serikat pada Juli 1997. Peristiwa tersebut memicu kepanikan di pasar keuangan internasional sehingga arus modal asing keluar dari berbagai negara Asia, termasuk Indonesia. Akibatnya, nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Meskipun dipicu oleh faktor eksternal, Indonesia memiliki berbagai kelemahan ekonomi yang menyebabkan dampak krisis menjadi jauh lebih berat dibandingkan negara lain. Krisis moneter di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga diperparah oleh berbagai kelemahan ekonomi dalam negeri.

Besarnya utang luar negeri swasta yang berjangka pendek, lemahnya sistem perbankan, kurangnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan, serta menurunnya kepercayaan investor menyebabkan dampak krisis menjadi semakin berat.

Selain itu, nilai tukar rupiah yang sebelumnya relatif stabil menjadi sangat rentan terhadap tekanan pasar sehingga nilai rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan memperburuk kondisi perekonomian nasional. Selain itu, nilai tukar rupiah yang dinilai terlalu tinggi (overvalued) membuat rupiah sangat rentan terhadap serangan spekulasi di pasar valuta asing. Kondisi tersebut menyebabkan nilai tukar rupiah yang sebelumnya berada di kisaran Rp2.400 per dolar Amerika Serikat terus melemah hingga sempat menembus lebih dari Rp13.000 per dolar Amerika Serikat pada awal tahun 1998. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor keuangan, tetapi juga pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Banyak perusahaan mengalami kebangkrutan karena tidak mampu membayar utang luar negeri, sektor perbankan mengalami krisis likuiditas, inflasi meningkat tajam, harga kebutuhan pokok melonjak, dan angka pengangguran bertambah akibat banyaknya pemutusan hubungan kerja. Krisis moneter kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, sosial, dan politik yang memicu demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah. Puncaknya terjadi setelah Tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei 1998 yang akhirnya mendorong Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.

Upaya B.J. Habibie Mengatasi Krisis Moneter

Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie secara konstitusional dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie telah dikenal sebagai ilmuwan dan insinyur dirgantara yang memiliki reputasi internasional melalui teori Crack Propagation sehingga memperoleh julukan Mr. Crack. Pengalaman panjangnya sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi serta kemampuannya dalam memecahkan berbagai persoalan teknis menjadi modal penting ketika harus memimpin Indonesia pada masa krisis. Pengalaman tersebut membentuk cara berpikir Habibie yang sistematis dan berbasis analisis dalam mengambil berbagai kebijakan strategis untuk memulihkan kondisi ekonomi Indonesia di tengah krisis. Habibie juga dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena kontribusinya dalam membangun industri strategis nasional.

Ketika mulai memimpin, Habibie menghadapi kondisi negara yang sangat sulit. Pemerintah harus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi sekaligus menjaga stabilitas politik yang masih bergejolak. Oleh karena itu, pemerintah melanjutkan kerja sama dengan International Monetary Fund (IMF) sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi. Kerja sama tersebut bertujuan memperoleh dukungan pendanaan sekaligus memulihkan kepercayaan pasar internasional terhadap perekonomian Indonesia.

Selain itu, pemerintah melakukan restrukturisasi sektor perbankan melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), membantu memperkuat kembali kondisi perbankan agar bank yang terdampak krisis dapat beroperasi normal, serta melakukan berbagai langkah untuk mengembalikan fungsi sistem keuangan nasional. Melalui BPPN, pemerintah menangani aset dan utang perbankan bermasalah sehingga sistem keuangan nasional dapat dipulihkan secara bertahap.

Salah satu kebijakan penting pada masa pemerintahan Habibie adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneter. Kebijakan tersebut menjadi tonggak penting reformasi ekonomi Indonesia karena memungkinkan Bank Indonesia lebih fokus menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi. Di samping itu, pemerintah juga memperbaiki tata kelola ekonomi, meningkatkan transparansi, membuka ruang investasi, serta melakukan berbagai reformasi politik seperti kebebasan pers dan penyelenggaraan Pemilu 1999 yang demokratis. Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian krisis tidak hanya dilakukan melalui pendekatan ekonomi, tetapi juga melalui pembenahan sistem pemerintahan secara menyeluruh.

Dampak Kebijakan B.J. Habibie terhadap Pemulihan Krisis Moneter

Berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa pemerintahan B.J. Habibie mulai menunjukkan hasil dalam waktu yang relatif singkat. Setelah mengalami pelemahan yang sangat tajam pada puncak krisis, nilai tukar rupiah secara bertahap mulai menguat sehingga meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap perekonomian nasional. Stabilitas nilai tukar tersebut turut berpengaruh terhadap menurunnya laju inflasi yang sebelumnya melonjak akibat kenaikan harga barang impor dan kebutuhan pokok. Dengan kondisi ekonomi yang mulai stabil, aktivitas produksi perlahan kembali berjalan dan dunia usaha mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pemulihan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Habibie tidak hanya terletak pada kemampuannya menstabilkan indikator ekonomi, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik dan investor terhadap negara yang saat itu berada di ambang krisis. Kepercayaan inilah yang menjadi modal penting bagi proses pembangunan pada pemerintahan berikutnya. Selain itu, reformasi pada sektor perbankan melalui restrukturisasi dan membantu memperkuat kembali kondisi perbankan nasional berhasil memperbaiki kondisi sistem keuangan Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan mulai pulih sehingga aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana dapat kembali berjalan.

Pemerintah juga berhasil menciptakan iklim ekonomi yang lebih kondusif sehingga kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri, mulai meningkat. Pemulihan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia keluar secara bertahap dari tekanan krisis moneter yang terjadi sejak tahun 1997. Pemulihan ekonomi yang diupayakan B.J. Habibie tidak akan bermakna tanpa disertai dengan pemulihan kepercayaan publik.

Habibie memahami bahwa runtuhnya perekonomian pada masa Orde Baru berakar pada hilangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, langkah strategis berikutnya yang ditempuh tidak hanya berfokus pada sektor ekonomi, tetapi juga pada bidang politik dan informasi, yakni membuka ruang kebebasan pers yang selama lebih dari tiga dekade mengalami berbagai pembatasan. Lebih dari sekadar mengatasi krisis ekonomi, kebijakan-kebijakan tersebut menjadi fondasi bagi Indonesia untuk bangkit sebagai negara yang lebih terbuka dan demokratis. Keberhasilan memulihkan stabilitas ekonomi memberi ruang bagi pelaksanaan berbagai agenda Reformasi yang kemudian membentuk arah perjalanan bangsa hingga saat ini. Inilah kontribusi nyata Habibie yang tidak hanya dirasakan pada masanya, tetapi juga menjadi pijakan bagi pemerintahan-pemerintahan setelahnya.

Membuka Gembok Kebebasan Informasi

Sebelum era Reformasi, kebebasan pers di Indonesia berada dalam kondisi yang sangat terbatas. Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto memandang pers bukan hanya sebagai media penyampai informasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas politik dan mempertahankan legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan berbagai mekanisme pengendalian agar informasi yang beredar tetap sejalan dengan kepentingan negara dan tidak memicu kritik yang dianggap mengganggu stabilitas nasional.

Salah satu bentuk pengendalian tersebut adalah penerapan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), yang mewajibkan setiap perusahaan pers memiliki izin dari pemerintah untuk dapat menerbitkan media. Karena izin tersebut dapat dicabut sewaktu-waktu, banyak media memilih melakukan self-censorship atau sensor diri demi mempertahankan keberlangsungan penerbitannya. Situasi ini semakin diperkuat setelah Peristiwa Malari tahun 1974, ketika sejumlah media yang memberitakan demonstrasi mahasiswa dibredel dan beberapa tokoh pers ditangkap. Peristiwa tersebut menjadi titik balik yang mempertegas dominasi pemerintah terhadap aktivitas pers sekaligus mempersempit ruang kebebasan berekspresi di Indonesia.

Pembatasan terhadap pers tidak hanya berdampak pada dunia jurnalistik, tetapi juga terhadap kualitas demokrasi dan hak masyarakat atas informasi. Ketika media kehilangan kebebasannya, masyarakat turut kehilangan akses terhadap informasi yang beragam, objektif, dan kritis, sehingga fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan tidak dapat berjalan secara optimal. Kondisi inilah yang kemudian melatarbelakangi munculnya tuntutan Reformasi 1998, termasuk desakan untuk mengembalikan kebebasan pers sebagai salah satu fondasi utama demokrasi Indonesia.

Langkah Berani Habibie Membuka Keran Kebebasan Pers

Pergantian pemerintahan pada tahun 1998 menjadi titik balik bagi kehidupan demokrasi Indonesia, termasuk dalam dunia pers. Di tengah situasi politik yang masih penuh ketidakpastian, B.J. Habibie mengambil langkah berani dengan menghapus Surat Izin Usaha

Penerbitan Pers (SIUPP), instrumen yang selama Orde Baru digunakan pemerintah untuk mengendalikan media. Sejak saat itu, media tidak lagi dibayangi ancaman pencabutan izin hanya karena menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Kebijakan ini mengakhiri praktik kontrol negara atas pers sekaligus membuka babak baru hubungan antara pemerintah dan media. Pers tidak lagi diposisikan sebagai alat kekuasaan, melainkan kembali menjalankan perannya sebagai penyampai informasi dan pengawas jalannya pemerintahan.

Komitmen tersebut semakin dipertegas melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Regulasi ini menjamin kemerdekaan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia sekaligus menghapus praktik sensor dan pembredelan yang selama puluhan tahun membatasi kebebasan berekspresi. Dengan perlindungan hukum yang lebih kuat, insan pers memperoleh ruang untuk menjalankan fungsi jurnalistik secara lebih independen sebagai penyampai informasi, pengawas kekuasaan (watchdog), sarana pendidikan publik, serta wadah penyampaian aspirasi masyarakat.

Perubahan itu segera terasa setelah Reformasi. Berbagai media cetak, elektronik, hingga media lokal bermunculan di berbagai daerah, diikuti meningkatnya jumlah wartawan dan berkembangnya organisasi profesi jurnalistik. Masyarakat pun memperoleh akses terhadap informasi yang lebih beragam, sementara pers memiliki ruang yang lebih leluasa untuk melakukan investigasi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dampaknya, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara semakin menguat karena pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang mengendalikan arus informasi.

Lebih dari sekadar membawa perubahan bagi dunia jurnalistik, kebijakan Habibie membangun fondasi demokrasi yang masih dirasakan hingga hari ini. Pers yang lebih bebas mendorong budaya keterbukaan, memperkuat pengawasan publik terhadap pemerintah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Memang, tantangan baru seperti disinformasi, kepentingan politik dalam kepemilikan media, dan tekanan terhadap jurnalis masih terus muncul. Namun, berbagai persoalan tersebut tidak menghapus arti penting keputusan Habibie yang membuka ruang kebebasan informasi sebagai salah satu warisan paling berharga bagi perjalanan demokrasi Indonesia.

Warisan yang Masih Relevan Hingga Hari Ini

Kebebasan pers bukan sekadar pelengkap demokrasi, melainkan salah satu fondasi yang membuat demokrasi dapat berjalan dengan sehat. Pemilu yang berlangsung secara rutin tidak akan bermakna apabila masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi yang bebas, berimbang, dan dapat dipercaya. Melalui kebijakan membuka ruang kebebasan pers, B.J. Habibie meletakkan dasar bagi terciptanya kehidupan demokrasi yang memberi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, mengawasi pemerintah, sekaligus menyampaikan kritik secara terbuka.

Warisan tersebut masih terasa hingga saat ini. Pers yang lebih independen memungkinkan berbagai persoalan publik, mulai dari kasus korupsi hingga penyalahgunaan wewenang, terungkap melalui kerja jurnalistik yang bebas dari tekanan negara. Dengan demikian, pers tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi salah satu pilar yang menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) dalam pemerintahan.

Meski demikian, kebebasan pers pada era digital menghadapi tantangan yang berbeda dengan masa Reformasi. Penyebaran hoaks, praktik *clickbait*, kepentingan politik dalam kepemilikan media, hingga intimidasi terhadap jurnalis menjadi persoalan yang terus menguji kualitas demokrasi Indonesia. Namun, tantangan tersebut bukan alasan untuk kembali membatasi kebebasan pers. Sebaliknya, kondisi ini menuntut penguatan profesionalisme jurnalistik, peningkatan literasi media masyarakat, serta penegakan hukum yang mampu melindungi kebebasan berekspresi.

Pada akhirnya, warisan terbesar B.J. Habibie bukan hanya terletak pada keberaniannya menghapus berbagai pembatasan terhadap pers, tetapi juga pada keberhasilannya mengembalikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Kepemimpinannya yang singkat membuktikan bahwa perubahan besar lahir dari keputusan yang berpihak pada kepentingan bangsa. Semangat yang sama juga tercermin ketika Habibie menghadapi persoalan Timor Timur, sebuah keputusan yang kembali menguji keberaniannya dalam memimpin Indonesia di tengah masa transisi Reformasi.

Dari Konflik Menuju Demokrasi

Keberanian B.J. Habibie mengurangi kontrol negara terhadap pers menjadi awal dari proses demokratisasi yang sesungguhnya. Komitmennya untuk meninggalkan pola pemerintahan yang represif pada masa Orde Baru kemudian diuji melalui persoalan yang jauh lebih kompleks dan sensitif, yaitu penyelesaian konflik di Timor Timur yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade. Dalam situasi tersebut, Habibie memilih pendekatan yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya, yaitu mengedepankan dialog dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Timor Timur untuk menentukan pilihan mereka melalui mekanisme yang lebih demokratis.

Pada Januari 1999, pemerintah menawarkan status otonomi khusus kepada Timor Timur agar wilayah tersebut tetap menjadi bagian dari Indonesia dengan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Namun, apabila tawaran tersebut ditolak, pemerintah bersedia memberikan kesempatan kepada masyarakat Timor Timur untuk menentukan masa depannya melalui referendum. Pilihan ini diambil karena pemerintah menyadari bahwa konflik Timor Timur telah berlangsung selama lebih dari dua dekade tanpa penyelesaian yang jelas, sementara tekanan dari masyarakat internasional terhadap Indonesia terus meningkat.

Dalam kondisi tersebut, referendum dipandang sebagai jalan untuk memperoleh kepastian status Timor Timur sekaligus mengurangi beban politik yang selama bertahun-tahun membayangi Indonesia.

Keputusan tersebut tidak lahir begitu saja. Sejak Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1976, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak pernah mengakui proses integrasi tersebut sehingga persoalan Timor Timur terus menjadi agenda dalam berbagai forum internasional. Di sisi lain, Portugal masih diakui PBB sebagai administering power atau pihak yang secara hukum internasional memiliki tanggung jawab administratif terhadap Timor Timur karena wilayah tersebut sebelumnya merupakan koloni Portugal. Oleh sebab itu, penyelesaian persoalan Timor Timur melibatkan Indonesia, Portugal, dan PBB sebagai mediator dalam proses perundingan.

Habibie memandang referendum sebagai jalan untuk memberikan kepastian atas status Timor Timur sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia sedang memasuki era Reformasi yang lebih terbuka terhadap penyelesaian konflik melalui mekanisme demokratis.

Pilihan ini tentu tidak bebas dari risiko politik. Namun, justru di sinilah terlihat bahwa kepemimpinan sering kali diukur bukan dari kemampuan mempertahankan keadaan yang ada, melainkan dari keberanian mengambil keputusan ketika semua pilihan sama-sama mengandung konsekuensi.

Keputusan Berani di Simpang Jalan Timor Timur

Komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan pilihan kepada masyarakat Timor Timur kemudian diwujudkan melalui perundingan bersama Portugal dan PBB. Hasilnya adalah *Agreement Regarding the Question of East Timor* yang ditandatangani di New York pada 5 Mei 1999. Berdasarkan kesepakatan tersebut, PBB membentuk *United Nations Mission in East Timor* (UNAMET) yang bertugas menyelenggarakan sekaligus mengawasi jalannya referendum agar berlangsung secara langsung, bebas, dan rahasia. Referendum akhirnya dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 dengan memberikan dua pilihan kepada masyarakat Timor Timur, yaitu menerima status otonomi khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau menolak otonomi khusus yang berarti memulai proses menuju kemerdekaan. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar isu politik antarnegara, tetapi juga menyangkut harapan masyarakat terhadap masa depan wilayahnya sendiri.

Hasil referendum tersebut kemudian menunjukkan pilihan mayoritas masyarakat Timor Timur terhadap masa depan wilayahnya. Berdasarkan laporan resmi Sekretaris Jenderal PBB, sebanyak 344.580 pemilih (78,5%) menolak tawaran otonomi khusus, sedangkan 94.388 pemilih (21,5%) memilih menerima otonomi khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hasil tersebut menjadi dasar dimulainya proses pemisahan Timor Timur dari Indonesia di bawah pengawasan PBB. Lebih dari sekadar menghasilkan angka kemenangan, referendum tersebut menjadi titik balik penting dalam sejarah Indonesia. Untuk pertama kalinya, penyelesaian persoalan Timor Timur ditempuh melalui mekanisme yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak selalu harus dilakukan melalui pendekatan kekuasaan, tetapi juga dapat ditempuh melalui proses demokrasi.

Jejak Referendum dalam Sejarah

Hasil referendum membawa dampak yang sangat besar, baik bagi Indonesia maupun Timor Timur. Setelah hasil jajak pendapat diumumkan, situasi keamanan di Timor Timur memburuk akibat pecahnya gelombang kekerasan yang menyebabkan kerusakan berbagai fasilitas umum, perpindahan penduduk dalam jumlah besar, serta meningkatnya krisis kemanusiaan. Untuk memulihkan kondisi tersebut, PBB membentuk *International Force for East Timor* (INTERFET) sebagai pasukan multinasional yang bertugas menjaga keamanan. Selanjutnya, PBB membentuk *United Nations Transitional Administration in East Timor* (UNTAET) untuk mengelola masa transisi hingga Timor Timur resmi menjadi negara merdeka pada tahun 2002.

Keputusan Habibie memunculkan beragam tanggapan. Sebagian masyarakat memandang referendum sebagai langkah yang tepat karena berupaya mengakhiri konflik berkepanjangan melalui cara yang lebih demokratis. Namun, sebagian lainnya menganggap keputusan tersebut sebagai kesalahan besar karena menyebabkan Indonesia kehilangan salah satu wilayahnya. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa keputusan politik sering kali tidak dapat memuaskan semua pihak, terlebih ketika menyangkut kepentingan nasional dan sejarah panjang suatu bangsa.

Meskipun menuai kontroversi, keputusan menggelar referendum Timor Timur juga memberikan sejumlah manfaat bagi Indonesia dalam jangka panjang. Hubungan diplomatik Indonesia dengan berbagai negara dan organisasi internasional mulai membaik karena pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan konflik melalui mekanisme yang difasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mulai meninggalkan pendekatan militeristik dan beralih pada penyelesaian konflik melalui diplomasi serta penghormatan terhadap hak menentukan nasib sendiri. Perubahan pendekatan ini turut meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap komitmen Indonesia dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi pada era Reformasi.

Selain itu, penyelesaian persoalan Timor Timur menjadi salah satu langkah yang memungkinkan pemerintah untuk lebih memusatkan perhatian pada berbagai agenda Reformasi di dalam negeri, seperti pemulihan ekonomi, penguatan demokrasi, dan pembenahan tata kelola pemerintahan.

Pada akhirnya, referendum Timor Timur tidak hanya mengubah status sebuah wilayah, tetapi juga menjadi salah satu momen yang membentuk arah perjalanan Reformasi Indonesia. Terlepas dari pro dan kontra yang masih terus berkembang, keputusan Habibie menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak selalu diukur dari seberapa populer sebuah kebijakan, melainkan dari keberanian mengambil keputusan yang diyakini dapat memberikan jalan keluar bagi persoalan bangsa.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun masa kepemimpinan Habibie berlangsung singkat, ia berani mengambil kebijakan yang selama bertahun-tahun tidak pernah diselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya. Terlepas dari berbagai penilaian terhadap hasil referendum, keputusan tersebut memperlihatkan komitmen Habibie untuk menempatkan dialog dan mekanisme demokrasi sebagai jalan penyelesaian konflik. Langkah ini menjadi salah satu kontribusinya dalam membangun citra Indonesia yang lebih terbuka, menghormati proses demokrasi, dan siap menghadapi tantangan global melalui pendekatan yang mengedepankan penyelesaian damai.

Refleksi: Kontribusi Kita

Kepemimpinan B.J. Habibie membuktikan bahwa kontribusi bagi bangsa tidak selalu diukur dari lamanya seseorang menjabat, tetapi dari keberanian mengambil keputusan pada saat yang paling menentukan. Dalam waktu yang relatif singkat, ia berhasil membawa Indonesia keluar dari masa krisis, membuka jalan bagi kebebasan pers, serta mengambil langkah-langkah penting yang membentuk arah demokrasi Indonesia hingga saat ini. Berbagai kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa perubahan besar dapat lahir dari dedikasi, integritas, dan keberanian untuk bertindak demi kepentingan bangsa.

Bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, kisah kepemimpinan Habibie menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi sesuai dengan peran yang dimiliki. Kontribusi tidak harus menunggu jabatan tinggi ataupun pengalaman yang panjang. Kepedulian terhadap lingkungan sekitar, keberanian menyampaikan gagasan yang membangun, serta komitmen untuk berkarya secara jujur dan bertanggung jawab merupakan langkah-langkah sederhana yang dapat membawa perubahan.

Jika B.J. Habibie mampu meninggalkan warisan yang tetap dirasakan bangsa hanya dalam masa kepemimpinan yang singkat, lalu kontribusi apa yang akan kita berikan bagi Indonesia mulai hari ini?. /MA

DAFTAR PUSTAKA

Habibie, B. J. (2006). Detik-detik yang menentukan: Jalan panjang Indonesia menuju demokrasi. THC Mandiri.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (n.d.). Masa pemerintahan B.J. Habibie: Reformasi ekonomi atasi krisis. Indonesia Baik.

Lowy Institute. (2019). *Habibie's lasting legacy in Indonesia*.

Museum Kepresidenan Republik Indonesia. (n.d.). *Sang Mr. Crack*.

Nirmaya, D. N., Farabi, F. F., & Lumbantobing, I. A. (2020). Pengaruh krisis moneter, nilai tukar, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, 2(1), 129–141.

The Habibie Center. (2019, 11 Agustus). B.J. Habibie, pendekatan "ajaib", dan krisis ekonomi 1998.

Tarmidi, L. T. (1999). Krisis moneter Indonesia: Sebab, dampak, peran IMF, dan saran. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 1(4), 1–26. <https://doi.org/10.21098/bemp.v1i4.183>

Ananova, O. F., Sopyan, M., & Jamil, J. (2024). Dinamika pers pasca reformasi di Kota Samarinda: Sebuah kajian historis tahun 1998–2003. *Amarthapura: Historical Studies Journal*, 3(1), 19–25. <http://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/amt/article/view/3429>

Dewan Pers. (n.d.). Tentang Dewan Pers. <https://dewanpers.or.id>

Habibie, B. J. (2006). *Detik-detik yang menentukan: Jalan panjang Indonesia menuju demokrasi*. THC Mandiri.

Maulana, R., Septiyana, D., Ginting, A. F. B., & Pardede, S. A. (2023). Rahasia terungkap: Menganalisis dinamika keamanan pers pada masa Orde Baru (1966–1998). *Histeria: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 2(2). <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/histeria/article/view/911>

Oktaviani, A., Martini, S., & Djunaidi. (2024). Pers yang terbelenggu tahun 1974–1998. *Periode: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 6(1). <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/periode/article/view/47383>

Putra, N. M. (2025). Kebebasan pers dalam transisi demokrasi: Studi kasus Indonesia pasca-Reformasi. *Publistik: Riset Jurnalistik dan Komunikasi Media*, 2(1). <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/publistikji/article/view/14655>

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers*. <https://jdih.dewanpers.or.id/dokumen/peraturan/undang-undang-republik-indonesia-nomor-40-tahun-1999-tentang-pers>

Safriady. (2021). Dilema laporan investigatif dalam perspektif kebebasan informasi. *Communication*, 12(1), 44–58. <https://journal.budiluhur.ac.id/comm/article/view/1332/930>

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (n.d.). *Presiden Republik Indonesia ke-3: B.J. Habibie*. <https://setneg.go.id>

United Nations. (1999a). *Question of East Timor: Report of the Secretary-General (A/53/951–S/1999/513)*. United Nations.

United Nations. (1999b). *Question of East Timor: Progress Report of the Secretary-General (A/54/654)*. United Nations.

United Nations. (2000). *Report of the Secretary-General on the United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET)*. United Nations.

Habibie, B. J. (2006). *Detik-detik yang menentukan: Jalan panjang Indonesia menuju demokrasi*. THC Mandiri.

Ngenget, I., & Jaya, I. (2023). *Mengenang kebijakan BJ Habibie dalam lepasnya Timor Leste dari Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(3), 710–716.

